

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin Zaenal, *Analisis Eksistensial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- August Kafiari, Tom Beanal, PT. Freeport Indonesia Dan Masyarakat Adat Suku Amungme. Forum Lorentz Jeremy Seabrook (2004). [*Consuming Cultures: Globalization And Local Lives*](#). New Internationalist. [ISBN 1-9044-5608-1](#), 2000.
- Agus Sumule, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Gramata Publishing, 2014.
- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ahmad Redi, *Hukum Energi: Konsep, Sejarah, Asas, dan Politik Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2020.
- Ali Afandi, *Kedudukan Hukum Asing Dalam Pembinaan Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1985.
- AP Palindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandar Maju, Bandung, 1998
- Ardiwilaga, Anwar R, *Pemerintahan Desa*, Tarase, Bandung 1970.
- Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, dan Saur Tumiur Situmorang, Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan. (Jakarta: Komnas HAM, 2016.)
- Bainton, N. & Cook, J. 2009. Challenges and Opportunities in the Development of a Cultural Heritage Management Strategy at the Lihir Gold Mine, Papua New Guinea. SDIMI 2009.
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum adat : hak menguasai negara atas sumber daya alam kehutanan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat*, EDISI, Cetakan 1 ; Penerbitan, Bandung : PT Refika Aditama, **2015**.
- Bank Dunia, “Ringkasan Eksekutif Perkembangan, Pemicu dan Dampak Harga Komoditas: Implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia”, Laporan Pengembangan Sektor Perdagangan, Kantor Bank Dunia Jakarta, Jakarta, 2010.

- Boedi, Harsono , *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UndangUndang, Djambatan Jakarta, 2008.*
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-. Undang. Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya: Jakarta: Djambatan, 2008.*
- Boulding, K. E, *Conflict and defense: A general theory, 1962.*
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition, St. Paul: West, 2009.*
- B. Teer Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980*
- Darji Dramodiharjo, Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1995.*
- Darwin Ginting, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Penanaman Modal Bidang Agrobisnis di Indonesia, (Bandung: Unpad Press, 2009.*
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia., Surabaya: Amelia, 2003.*
- Domikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, Surabaya: LaksBang Justitia, 2011.*
- Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen dan Energi, *Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun Mendatang , Jakarta: Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen dan Energi, 1995.*
- Eddy Ruchiyat, *"Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi", Bandung: Alumni, 1999.*
- Filer, C, 1997. *Compensation, rent and power in Papua New Guinea, in Compensation for Resource Development in Papua New Guinea (ed: S Toft), (The Australian National University: Canberra).*
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif, Jakarta: Nusamedia, 2009.*
- H. Ateng Syafrudin, *Republik desa : pergulatan hukum tradisional dan hukum modern dalam desain otonomi desa, Bandung, Alumni, 2010.*
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada., 2008*
- Hasibuan, Otto, 2008. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society. Bandung: PT Alumni.*
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata.*
- Irawan, Andrie, 2014. *Corak Hukum Adat Sebagai Pengenal Hukum Adat. Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto. 2014.*

- Jazim Hamidi, “Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Risalah Hukum*, 2, 2006.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Kitchener: Batoche Books, 2000.
- Jeremy Seabrook (2004). *Consuming Cultures: Globalization And Local Lives*. New Internationalist. ISBN 1-9044-5608-1.
- J.H.Burns and H.L.A. Hart (eds.), *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government, The Collected Works of Jeremy Bentham*, The Athlone Press, London, 1977.
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- John Stuart Mill, *On Liberty*, Himmelfarb (ed.), London: Penguin Classics, 1974
- Kal Muller, *Dataran Tinggi Papua*, 2009
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Tahun 2018*, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019.
- Kemp. D. L., Gillespie, K. and R. B. Ramsay. (2012). Case report 1: Papua New Guinea case study. In Keenan & Kemp, *Mining and local-level development: Examining the gender dimensions of agreements between companies and communities*. Brisbane, Australia: Centre for Social Responsibility in Mining, The University of Queensland.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1982.
- Komnas HAM, *Monitoring dan Evaluasi: Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah*. (Jakarta: Komnas HAM, 2018)
- Komnas HAM, *Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Komnas HAM, 2021).
- Lewis, M., P, *Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition*. Dallas, USA: SIL International, 2009.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

- Macintyre, M and Foale, S, 2004. *Global imperatives and local desires: Competing economic and environmental interests in Melanesian communities, in Globalization and Culture Change in the Pacific Islands*, (ed: V S Lockwood), (Prentice Hall: New Jersey)
- Maria S.W. Sumardjono, "*Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi*", (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001).
- Mochtar, Zinal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S. 2021. DASAR-DASAR ILMU HUKUM MEMAHAMI KAIDAH, teori, Asas, dan Filsafat Hukum. Cetakan Ke-1. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, "*Politik Hukum Di Indonesia*", (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998).
- Monash University. Castan Centre for Human Rights Law, United Nations. Global Compact Office, Prince of Wales International Business Leaders Forum, United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights (2008). *Human Rights Translated: A Business Reference Guide*. United Nations Publications. [ISBN 0-9752-4425-6](https://doi.org/10.18464/urn:nbn:de:hbz:5:1-63868-p0011-9).
- M.R Saleh, Masyarakat Adat dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. (Yogyakarta: Pusham UII, 2007).
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria*, Yogyakarta: Citra Media, 2007.
- Muhammad Ishak Razak, "*Kebijakan dan Dampak Ekonomi Sektor Pertambangan*", dalam *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*, ed. Ahmad Khoirul Umam, Jakarta: Universitas Paramadina, 2021.
- Mr Paul **Scholten**. STRUKTUR ILMU. HUKUM. Diterjemahkan oleh. B. **Arief Sidharta**. Bandung. 2002.
- Mr. C. Van Vollenhoven, *De Ontdekking Van Het Adatrecht, N.V Boekhandel En Drukkerij V/H E.J. Brill*, Leiden, 1928.
- Lorens bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Luiz Carlos Mariano da Rosa, *Het Gebed Tussen Yahveh En Abba In Joods-Christelijke Monotheisme*, Sciencia Scripts, International Book Market Service, 2020
- Pendaftaran Tanah Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1999.
- RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996).

- Sajuti Thalib, *Hukum Pertambangan Indonesia* (Bandung: Penerbitan Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Saragih, Drajen, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi II*, Tarsito, Bandung, 1984
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003.
- Satjipto Rahardjo**, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soedjono Dirdjosoworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerojo Wignyodipuro, *PENGANTAR DAN ASAS-ASAS HUKUM ADAT INDONESIA*, Publisher: Jakarta : Gunung Agung, 1978.
- Soerjono Sukanto, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2015.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *"Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional; Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial - Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840- 1990)"*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Sri Soemantri M, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994,
- Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia : Dalam Kajian Kepustakaan* / Tolib Setiady .2013.
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hak Masyarakat, Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. (Jakarta: Komnas HAM, 2016), ISBN 978-602-74201-0-6.
- Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.

- Saafoedin Bahar, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi manusia, Jakarta : 2005.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Soerjono Sukanto, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press, 2015, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Siti Rahmana, *Dari Mendulang Jadi Menambang: Jalur Emas di Lebong (Bengkulu) Abad XIX hingga Abad XX*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sutikno Bronto dan Udi Hartono, “*Potensi Sumber Daya Geologi di Daerah Cekungan Bandung dan Seitarnya*”, Jurnal Geologi Indonesia, 1, 2006.
- Syaukani HR, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2002.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta. Kencana, 2010.
- Van Vollenhoven, *Het Adatrech Van Nederlands Indie*, 1926.
- World Bank. (2010). *Mining Foundations, Trusts and Funds: A Sourcebook*. Washington DC, USA: World Bank.
- Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

JURNAL / ARTIKEL

- Aulia Vivi Yulianingrum, *Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional*, Jurnal Yuriska 10, no. 1 (2018): 81.
- Andreas J. Deda dan Suriel S. Mofu, *Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsip Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua ditinjau dari sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian*, Jurnal Administrasi Publik, volume 11 nomor 2, oktober 2014.
- A. Joni Minulyo, *Asas-Asas Pembaharuan Hukum Agraria*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober, Vol.25, No.4, 2007.
- A. Pinondang caroline, a. Naryoso, and j. Ns gono, "*corporate social responsibility (csr) untuk peningkatan pendidikan formal masyarakat papua di kabupaten mimika sebagai upaya pembangunan reputasi pt freeport indonesia*," interaksi online, vol. 12, no. 1, pp. 258-275, dec. 2023. [online].

- Achmad Irwan Hamzani, *menggagas indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*, Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014
- Aderito De Jesus Soares, *The Impact of Corporate Strategy on Community Dynamics: A Case Study of the Freeport Mining Company in West Papua, Indonesia*, *International Journal on Minority and Group Rights* 11: 115–142, 2004, Koninklijke Brill NV. Printed in the Netherlands
- Adeyeye, A. (2011). *Universal standards in CSR: are we prepared. Corporate Governance: The international journal of business in society*.
- Ahmad Syafi'i, Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi and Lukito, Ratno, *The Logic of State Authority on the Control of Agrarian Resource (Socio-Anthropological and Islamic Perspective)* (November 6, 2019). *American Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 4, No. 4, 516-527, 2019 e-ISSN: 2520-5382, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3481739> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3481739>
- Ahmad N. Luthfi dan Moh. Shohibudin, *Mempromosikan Hak Komunal, Reforma Agraria Dalam Konstitusi*, Resensi Buku, Digest Epistema, Vol. 6, 2016.
- Ahmad Redi, “Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5, 3, 2016.
- Ahmad Redi, *Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Undang : Jurnal Hukum, Vol. 4, No.2, 2021.
- Arasy Pradana A. Azis and Yance Arizona, “Afirmasi MK terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat sebagai Subyek Hak Berserikat di Indonesia (Analisis terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012),” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (May 15, 2019): 23, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.300>
- Arora, B., Kourula, A., & Phillips, R. (2020). *Emerging paradigms of corporate social responsibility, regulation, and governance: Introduction to the thematic symposium. Journal of Business Ethics*, 162(2).
- Atip Latipul Hayat, *Jeremy Bentham : Khazanah*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.
- Aulia Vivi Yulianingrum, “Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional,” *Jurnal Yuriska* 10, no. 1 (2018): 81. Lihat juga Tim Penyusun,

- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Azizi, S. (2020). *Political Corporate Social Responsibility (CSR), Development, and Business Legitimacy. In Handbook of Business Legitimacy (pp. 1295-1308). Springer, Cham.*
- Bainton, N., A. (2010). *Lihir Destiny: Cultural Responses to Mining in Melanesia (Vol. 5):* ANU E Press.
- Banks, G, 1998. Compensation for communities affected by mining and oil developments in Melanesia, *The Malaysian Journal of Tropical Geography*.
- Banks, G. (2008). Understanding 'resource' conflicts in Papua New Guinea. *Asia Pacific Viewpoint*, 49(1).
- Barnett, M. L. (2019). *The business case for corporate social responsibility: A critique and an indirect path forward. Business & Society*, 58(1), 167-190
- Bisariyadi Bisariyadi, "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (July 24, 2017): 23, <https://doi.org/10.31078/jk1412>.
- Brandstedt, Eric, 'The Just Savings Principle', in Stephen M. Gardiner (ed.), *The Oxford Handbook of Intergenerational Ethics* (online edn, Oxford Academic, 10 Mar. 2021), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190881931.013.32>, accessed 5 Aug. 2024.
- Brian Kogelmann, Justice, Diversity, and the Well-Ordered Society, *The Philosophical Quarterly*, Volume 67, Issue 269, October 2017. <https://doi.org/10.1093/pq/pqw082>
- Carroll, A. B. (2021). *Corporate social responsibility: Perspectives on the CSR construct's development and future. Business & Society*, 60(6).
- Cramer, J. (2017). *Corporate Social Responsibility and Globalisation: an action plan for business. Routledge.*
- DA Wicaksono, Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon bagi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Vol.20, (3), 2023.
- Daron Acemoglu, Alexander Wolitzky, A Theory of Equality Before the Law, *The Economic Journal*, Volume 131, Issue 636, May 2021, Pages 1429–1465, <https://doi.org/10.1093/ej/ueaa116>
- Darwin Ginting, 2012, Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1*.
- Dominikus Rato, *Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat Yang Bhinneka Tunggal Ika*, Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i2.147

- Faradistia Nur Aviva. (2023). *Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia*. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 111–123.
<https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>
- Fatma Dian Pratiwi, *Kontradiksi Bumi Papua : PT. Freeport Indonesia di Papua*, Jurnal Komunikasi, Vol.3, No.2, April 2009.
- Feleagă, L., Dumitrașcu, M., & Feleagă, N. (2017). *Corporate social responsibility and its impact on corporate governance: comparative study between listed companies on Bucharest and Bombay stock exchange*. *International Journal of Economics and Management Engineering*, 10(11).
- Filer, C. (2008). Development Forum in Papua New Guinea: Upsides and Downsides. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 26(1), 120-150., Filer, C. (2012). The development forum in Papua New Guinea: evaluating outcomes for local communities. In M. Langton & J. Longbottom (Eds.), *Community Futures, Legal Architecture: Foundations for Indigenous Peoples in the Global Mining Boom*. Oxford, UK: Routledge.
- Gjølberg, M. (2011). *Explaining regulatory preferences: CSR, soft law, or hard law: Insights from a survey of Nordic pioneers in CSR*. *Business and Politics*, 13(2), 1-31.
<https://doi.org/10.2202/1469-3569.1351>.
- Ginting, Jamin. (2007). *Juridical Review of Corporate Social Responsibility (CSR) in Good Corporate Governance (GCG)*, Lex Journalica, 5(1).
- Gratianus Prikasetya, *intergentiele grondenregel dalam hukum antar tata hukum intern terkait kepemilikan hak atas tanah bagi wni keturunan tionghoa di wilayah diy*, Jurnal RechtsVinding, Vol7, No.2, Agustus 2018.
- Gunawan Wiradi, *Transformasi Pertanian : Quo Vadis*, Jurnal Sosial Ekonomi Ekspresi, No.1, Desember 1989.
- Harpani Matnuh, *Law As a Tool of Social Engineering Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences Education - "Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment" (ICSSE 2017)*, Atlantis Press
- Hartanto, J. Andy, *JAH* (2019). *Applications of good corporate governance relating to shareholders, commissioners, and directors of limited liability companies in Indonesia*. *Problems and Perspectives in Management*, 17(3), 410-420.

- Hartati, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Masalah-Masalah Hukum*, 41, 2012.
- Hastana, *Implikasi Ekspansi Perusahaan Group Pada Sektor Pertambangan Batubara di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022)
Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Hayatul Ismi, “Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau* 1, no. 1 2012.
- Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- H.L.A. Hart, *Essays on Bentham, Jurisprudence and Political Theory*, Oxford: Clarendon Press, 1982
- Ilham Yuli Isdiyanto, *Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial*, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 9 No. 1, Februari 2018.
- Indra Perwira, “Realitas Politik Hukum Perundang-undangan Indonesia Pasca Reformasi”, *Padjadjaran Law Review*, 5, 2017.
- Irfan Nur Rahman dkk., “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (May 20, 2016): 771, <https://doi.org/10.31078/jk856>.
- Ilyas Ismail, *kedudukan dan pengakuan hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional*, *KANUN*, No.50, Edisi April 2010.
- Irfan Nur Rahman et al., “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (May 20, 2016): 771, <https://doi.org/10.31078/jk856>.
- Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan hak-hak Tradisionalnya*, *Pandecta*, Vol.10, No.1 June 2015, hlm. 2, DOI <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>
- Thontowi, Jawahir. 2008. *Penelitian Antropologi Budaya Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pusat Pengembangan Perbatasan di Kecamatan Saajingan Besar*,

- Kabupaten Sambas. Kalimantan Barat, diselenggarakan berkat kerjasama CLDS FH UII dengan Bappeda Kabupaten Sambas
- Karen Mills dan Mirza A. Karim, "Disputes in the Oil and Gas Sector: Indonesia", *Journal of World Energy Law & Business*, 3, 1 2010.
- Khan, M., Hassan, A., Harrison, C., & Tarbert, H. (2020). *CSR reporting: A review of research and agenda for future research. Management Research Review*.
- Khan, M., & Lockhart, J. (2022). *Corporate social responsibility decoupling in developing countries: Current research and a future agenda. Business and Society Review*, 127(1).
- Khuong, MN, Truong An, NK, & Thanh Hang, TT (2021). *Stakeholders and Corporate Social Responsibility (CSR) program as key sustainable development strategies to promote corporate reputation-evidence from vietnam. Cogent Business & Management*, 8(1), 1917333.
- Kurniawan, I. D., & AP, H. A. (2023). DILEMA FILOSOFIS IMPLEMENTASI TEORI HUKUM: STUDI TENTANG PROBLEMATIKA PEMANFAATAN HAK MILIK TANAH ANTARA SUKU ADAT AMUNGME DENGAN PT. FREEPORT INDONESIA. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 20(2), 125 - 133. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v20i2.880>.
- Kwadwo, AS, Yusheng, KONG, Mohammed, MUSAH, & Mary, DONKOR (2021). *World Governance Indicators and Fraud: Evidence from One Belt One Road Countries. The Economics and Finance Letters*, 8(2).
- Lu, J., Ren, L., Zhang, C., Qiao, J., Kovacova, M., & Streimikis, J. (2020). *Assessment of corporate social responsibility and its impacts on corporate reputation of companies in selected Balkan Countries former Yugoslavia States. Technological and Economic Development of Economy*, 26(2).
- Luthfi, Rosihan. 2022. Ilmu Hukum Disiplin Ilmu yang Bersifat Sui generis. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3*, <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/download/1975/1408>
- Macintyre, M, Foale, S, Bainton, N and Moktel, B, 2005. Medical pluralism and the maintenance of a traditional healing technique on Lihir, Papua New Guinea, Pimatisiwin: A Journal of Aboriginal and Indigenous Community Health.
- Marsudi Dedi Putra, **kontribusi aliran *sociological jurisprudence* terhadap pembangunan sistem hukum Indonesia, LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume. 16, Nomor 2.**

- Marhcel R. Maramis, “Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak ulayat Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 21, No. 4, (Juni 2013).
- Muruviwa, AT, Nekhwevha, FH, & Akpan, W. (2018). *Corporate social responsibility as a drive to community development and poverty reduction: A stakeholder approach to development in Zimbabwe. TD: The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*, 14(1).
- Marthen B. Salinding , Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.
- M. Muslih, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch, *Jurnal Legalitas*, Edisi Juni 2013, Vol.IV, No.1, Hlm. 148.
- Muhammad Bakri, Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonsruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA), *Kertha Patrika*, Vol. 33, No.1, Januari 2008, hlm. 1
- Moho, Hasaziduhu. 2019. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Keppastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta* Edisi :59 Vol 13 No 1, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>
- M. Misbahul Mujib, Kajian Sosio Historis Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.4, No.1, Juni 2015.
- Muhammad Citra Ramadhan, Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Warta* Edisi : 53, Juli 2017. ISSN : 1829 – 7463
- Nabilla Desyalika Putri, Kedudukan Hukum Kegiatan Usaha Pertambangan Pada Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Negara Kesejahteraan, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Hal. 18. <https://core.ac.uk/reader/294925890>
- Nina Rosenstand, *The Moral of The Story An Introduction to Ethics*, New York:McGraw-Hill, 2005.
- Noer Fauzi Rachman (et. al.), “Kajian Kritis atas Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, *Kertas Kerja Epistema No.01/2012*, hal.16, doi: <http://epistema.or.id/kajian-kritis-atas-peraturan-menteri-agraria/>
- Nova Yarsina, Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukit Tinggi, *Jurnal Cendiaka Hukum*, 2018
- Paulus R.T Paramma, Dampak Keberadaan PT.Freeport Indonesia Terhadap Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat Suku Amungme Dan Suku Kamoro di Kabupaten, Vol.1, No.1, 2013.

- Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics", no. 58, Oktober 1999.
- Retnaningsih, Hartini. (2015). *Problems of Corporate Social Responsibility (CSR) in the Context of Community Empowerment, Aspirations*, 6(2)
- R. Yando Zakaria, "Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012," *Jurnal Kajian* 19, no. 2, 2014.
- Samuel Rizal, DB. Paranoan, dan Suarta Djaja, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman," *Jurnal Administrative Reform*, 1, 3, 2013.
- Schwartz, MS, & Carroll, AB (2003). *Corporate social responsibility: A three-domain approach. Business Ethics Quarterly*, 13(4).
- Sch Carroll, A. B. (1991). *The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business horizons*, 34(4), 39-48.
- wartz, MS, & Carroll, AB (2003). *Corporate social responsibility: A three-domain approach. Business Ethics Quarterly*, 13(4).
- Sri Harini Dwiyatmi, Asas Pemisahan Horizontal dan Asas Perlekatan Dalam Hukum Agraria Nasional, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Oktober 2020, Halaman 125-144 DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p125-144> Open access at: <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum>
- Tarigan dkk, Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Kesehatan PT Freeport Indonesia di Era Pandemi Covid-19, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, p-ISSN 0853-7720; e-ISSN 2541-4275, Volume 8, Nomor 1, halaman 112 – 124, Januari 2023 DOI ; <https://doi.org/10.25105/pdk.v8i1.15094>
- Teddy Anggono, "Kajian Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan republic Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 36, No. 4. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1477>.
- T. Widiyono, and M. Z. K. Khan, "Legal Certainty in Land Rights Acquisition in Indonesia's National Land Law," *LAW REFORM*, vol. 19, no. 1, pp. 128-147, Aug. 2023. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.48393>
- Umar Hasan, dkk, *Eksistensi Hak Ulayat dalam Masyarakat Adat*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.40, No.2, Desember 2020.
- Ulya Kencana, dkk, Corporate Social Responsibility in Indonesia Law and Legal Validity, *Russian Law Journal*, Vol. XI (2023) Issue 3.

- Uyar, A., Karmani, M., Kuzey, C., Kilic, M., & Yaacoub, C. (2021). *Does governance quality explain the sustainability reporting tendency of the public sector? Worldwide evidence. International Journal of Public Administratio.*
- Van Vollenhoven, Het Adatrech Van Nederiands Indie, 1926.
- Verlia Kristiani, Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian dan Implementasi), *ADIL: Jurnal Hukum Vol.11 No.1*, 2020.
- Wang, D., Zhu, Z., Chen, S., & Luo, XR (2022). *Correction to: Running out of steam: A political incentive perspective of FDI inflows in China. Journal of International Business Studies*, 53(2),
- William Nelson, The Very Idea of Pure Procuderal Law, *Journal Ethics*, Vol.90, No.4 Juli 1980.
- Witrianto, Manajemen Konflik Dalam Pembangunan Masyarakat di Mimika Papua, *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 1 No. 2, November 2015.
- Widjaja, G. (2021). *Impact of transfer pricing toward benefits and sustainability of multinational hotel industry. Linguistics and Culture Review*, 5(S4).
- Zainal, RI (2020). *Comparison of Perceptions among Stakeholders in CSR Synergy and Regional Development Programs. Pareto: Journal of Economics and Public Policy*, 3(3), 31-44.
- Zayanti Mandasari, 2014, Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi), *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 21*, Hal. 249

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Pokok Agraria

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Minerba

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua"(2001). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua" (2021).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2005), 16.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2007).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 164-166.

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 1959.

Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1958

Peraturan Presicen Nomor 32 Tahun 1969

Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

INTERNET

Admin, Industri Batubara Nasional Dan Amanat Pasal 33 UUD 1945. Diakses dari <http://www.berdikarionline.com/kabarrakyat/20111113/industri-batubara-nasional-dan-amanat-Pasal-33-uud-1945.html>

- Admin, Lahir.Info, *Lihir Mining Area Landowners Association*, <https://lihir.info/lihir-today/lihir-gold-mine/stakeholders/lmala>, diakses pada 15 Juni 2024.
- Afif Farhan, Detik.com, Mengenal 7 Suku yang Hidup di Sekitar Tambang Freeport, <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-4121389/mengenal-7-suku-yang-hidup-di-sekitar-tambang-freeport>.
- Akhilesh Ganti,[Investopedia.com] What Is a Trust Fund and How Does It Work, dikutip dari : <https://www.investopedia.com/terms/t/trust-fund.asp>.
- Ali Nur Ichsan, Antaranews.com, Banti 2 dan Banti 1, di kutip dari : <https://papuabaratanews.com/berita/42837/freeport-bangun-jembatan-hubungkan-kampung-banti-2-dan-banti-1>
- Amanda Ayudhia S., “Batubara sebagai Sumber Energi: Asal, Jenis, dan Kegunaannya”, Admin,Wikipedia.com,Tembagapura,Mimika,<https://id.wikipedia.org/wiki/Tembagapura,Mimika>. diakses pada 9 Juli 2024.
- <https://ugrg.ft.ugm.ac.id/artikel/batubara> sebagai sumber energi asal jenis dan kegunaannya,
- Arief Hidayat, “Netizen dan Media Sosial: Arsenal Baru Pembumian Nilai-Nilai Pancasila Pada Era Kekinian,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16561> (diakses 16 Juli 2021).
- Arif R. Uropdana, “Pertambangan di Indonesia dari Masa VOC sampai Orde Baru (Freeport)”, <https://jubi.co.id/pertambangan-di-indonesia-dari-masa-voc-sampai-orde-baru-freeport/>, 30/5/2020, diakses 20/10/2021.
- Barometer, Barometer.com, Pemilik Hak Ulayat Tolak Perpanjangan Izin PT Freeport Indonesia, <https://barometer.co.id/2022/11/pemilik-hak-ulayat-tolak-perpanjangan-izin-pt-freeport-indonesia/>. diakses pada 9 Juli 2024.
- Central Intelligence Agency [CIA]. (2012). The World Factbook, East and Southeast Asia: Papua New Guinea. Retrieved from <https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/pp.html>.
- D Arifin , Tinajau Pustaka : Kesejahteraan Sosial, Universitas Medan Area, 2015, via : repositori.uma.ac.id. diakses pada 22 Oktober 2023.
- Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT]. (2012). Papua New Guinea Country Brief. Retrieved from http://www.dfat.gov.au/geo/png/png_brief.html.
- detiknews, "Masyarakat Adat Papua Gugat PT Freeport US\$ 30 M" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-1166260/masyarakat-adat-papua-gugat-pt-freeport-us-30-m>.

- Timika, 4 agustus 2023, ketua/amungme nagawan lembaga musyawarah adat suku amungme, manuel john magal, s.e., s.th.,
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Paripurna DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021,” 2021, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32239/t/Paripurna+DPR+Sepakati+33+RUU+Prolegnas+Prioritas+2021>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “RUU tentang Masyarakat Hukum Adat,” 2020, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/394>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “RUU tentang Masyarakat Hukum Adat,” 2020, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/394>
- Donald Karouw, Inews Papua.com, Warga Kampung Waa Banti Tembagapura Kini Bisa Nikmati Kembali Air Bersih dan Listrik, <https://papua.inews.id/berita/warga-kampung-waa-banti-tembagapura-kini-bisa-nikmati-kembali-air-bersih-dan-listrik>. Diakses pada 6 Agustus 2024.
- Elik S, Tempo.co, Suku Amungme Tagih Jatah Laba Satu Persen Freeport, dikutip melalui halaman website : <https://nasional.tempo.co/read/135445/suku-amugme-tagih-jatah-laba-satu-persen-freeport>.
- Elsam, “Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam. Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII), 14 Desember 1962,” [https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/11/Resolusi Majelis-Umum-1803-Kedaulatan-Permanen-atas-Sumber-Daya-Alam.pdf](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/11/Resolusi_Majelis-Umum-1803-Kedaulatan-Permanen-atas-Sumber-Daya-Alam.pdf).
- Elsam, “Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya” <https://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf>, diakses 16 Juli 2021.
- Estu Suryowati, ‘659 Konflik Agraria Tercatat Sepanjang 2017, Mencakup Lebih dari 500.000 Hektar’, <<http://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/14592061/659-konflik-agrariatercatat-sepanjang-2017-mencakup-lebih-dari-500000>>,
- Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- Hafizh Mulia, 4 Maret 2021, [Asumsi.co], Sejarah Freeport di Indonesia dan Mengapa Keberadaannya begitu kontroversial, dikutip dari : <https://asumsi.co/post/56402/inilah-sejarah-dan-pelanggaran-pelanggaran-yang-dilakukan-freeport-selama-di-indonesia/>. Diakses pada 1 Agustus 2024.

Hotden Manurung dan Amanda Ayudhia S, “Sumber Daya Geologi Indonesia”,
<https://ugrg.ft.ugm.ac.id/artikel/sumberdaya-geologi-indo-nesia/>.

Humas MKRI, MK Kabulkan Sebagian Gugatan Walhi dalam Pengujian UU Minerba, diakses
via : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18560>. Pada 25 Oktober
2023.

[https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/pengadilan-memerintahkan-freeport-untuk-
menyelesaikan-masalahnya](https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/pengadilan-memerintahkan-freeport-untuk-menyelesaikan-masalahnya)

<https://www.fcx.com/>.

<https://www.scribd.com/document/402047396/Papua>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Amungme.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tambang_Grasberg.

<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.

[https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305841-D%201270-Perizinan%20pertambangan-
full%20text.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305841-D%201270-Perizinan%20pertambangan-full%20text.pdf)

<https://ptfi.co.id/id/kemitraan-ypmak>.

[https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tyromhldre3&div=18&id=&p
age=](https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tyromhldre3&div=18&id=&page=). Diakses pada 5 Agustus 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/L.W.C_van_den_Berg. Diakses pada 5 Agustus 2024.

<http://repository.uph.edu/>. Diakses pada 22 Oktober 2023.

<http://repository.uph.edu/58112/>

<https://scholar.google.co.id/citations?user=fpaPNlQAAAAJ&hl=id>.

<https://repository.ugm.ac.id/>. Diakses pada 22 Oktober 2023.

I Ketut Raharja,dkk, Analisis Bergaining Power Indonesia dan PT Freeport Indonesia Dalam
Negosiasi Pengalihan Kontrak Karya Menjadi Usaha Izin Usaha Pertambangan Khusus
Tahun 2017-2018, diakses dari :
[https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1702132&val=5807&title
=ANALISIS%20BARGAINING%20POWER%20INDONESIA%20DAN%20PT%20
FREEPORT%20INDONESIA%20DALAM%20NEGOSIASI%20PENGALIHAN%20
KONTRAK%20KARYA%20MENJADI%20IZIN%20USAHA%20PERTAMBANGA
N%20KHUSUS%20TAHUN%202017%20%202018](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1702132&val=5807&title=ANALISIS%20BARGAINING%20POWER%20INDONESIA%20DAN%20PT%20FREEPORT%20INDONESIA%20DALAM%20NEGOSIASI%20PENGALIHAN%20KONTRAK%20KARYA%20MENJADI%20IZIN%20USAHA%20PERTAMBANGAN%20KHUSUS%20TAHUN%202017%20%202018)

Ikbal, “Pelaksanaan Principle Free Prior Informed and Consent dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional,”
<https://onesearch.id/Record/IOS427.article-352,\>

Industri Batubara Nasional Dan Amanat Pasal 33 UUD 1945. Diakses dari
<http://www.berdikarionline.com/kabarrakyat/20111113/industri-batubara-nasional-dan-amanat-Pasal-33-uud-1945.html> Pada tanggal 22 Oktober 2023.

Inggra Parandaru, Sejarah Peristiwa Mei 1998: Titik Nol Reformasi Indonesia,
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-peristiwa-mei-1998-titik-nol-reformasi-indonesia>. Diakses pada 5 Agustus 2024.

Irma Reisalinda Ayuningsih, Mengenal Economic Analysis of Law, diakses melalui website :
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16122/Mengenal-Economic-Analysis-of-Law.html>. Pada 22 Oktober 2023.

Janedjri M. Gaffar, “Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, makalah dalam Seminar Nasional Pancasila, Surakarta, 17/10/2009, tersedia pada
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf, hlm. 1.

John Magal, Jubi.,Id,Setengah abad PT Freeport Keruk Gunung Keramat oreng Amungsa,
<https://jubi.id/opini/2024/setengah-abad-pt-freeport-keruk-gunung-keramat-orang-amungsa/>. diakses pada 9 Juli 2024.

Khaerudin, Kompas.com, *Freeport Indonesia di Persimpangan Jalan*,
<https://interaktif.kompas.id/baca/freeport-indonesia/>.

KPA Tahun 2017, “Catatan Akhir Tahun 2017: Reforma Agraria Dibawah Bayang Investasi, Gaung Besar Dipinggir Jalan,
<http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/d5a29-catahu-2017-kpa.pdf>.

Martha Pigome, Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah, diakses pada tanggal 1 November 2023 via :
<https://media.neliti.com/media/publications/4701-ID-politik-hukum-pertambangan-indonesia-dan-pengaruhnya-pada-pengelolaan-lingkungan.pdf>.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Siaran Pers Cadangan Batubara Masih 38,84 Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong”, 26/7/2021, diakses 10/10/2021.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Kilas Balik Sejarah Pertambangan dan Energi di Indonesia”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kilas-balik-sejarah-pertambangan-dan-energi-di-indonesia>, 15/10/2008.

Martha Pigome, Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah, diakses pada tanggal 1 November 2023 via : <https://media.neliti.com/media/publications/4701-ID-politik-hukum-pertambangan-indonesia-dan-pengaruhnya-pada-pengelolaan-lingkungan.pdf>.

Martin Sitompul, “Mendulang Sejarah Tambang Nusantara”, <https://historia.id/ekonomi/articles/mendulang-sejarah-tambang-nusantara-P4WOp/page/1>, 26/9/2017, diakses 20/10/2021.

Muhammad Razi Rahman, Antaranews.com, Koalisi LSM : Freeport Jangan Hanya Wacana Politik, dikutip dari : <https://www.antaranews.com/berita/615443/koalisi-lsm-freeport-jangan-hanya-wacana-politik>.

Nevriza Wahyu Utami, 3 Alasan Papua Masuk ke Indonesia, Nomor Satu Penyerahan Kekuasaan Belanda, dikases melalui web : <https://nasional.okezone.com/read/2023/02/14/337/2764672/3-alasan-papua-masuk-ke-indonesia-nomor-satu-penyerahan-kekuasaan-belanda#:~:text=Ketika%20Belanda%20menyerahkan%20kedaulatan%20kepada,Papua%20kembali%20menjadi%20bagian%20NKRI>. Pada 7 April 2024.

Newcrest. (2011). Newcrest Sustainability Report: Miner of Choice: Report 2011. Retrieved from <http://www.newcrest.com.au//sources/index.htm>.

Mutiul Alim, “Komnas HAM Sebut Pemerintah dan PT Freeport Rampas Lahan Suku Amungme”, <http://www.jurnas.com/artikel/14230/Komnas-HAM-Sebut-Pemerintah-dan-PTFreeport-Rampas-Lahan-Suku-Amungme/>.

Quinawaty Pasaribu, “Tersingkir Perlahan Dari Tanah Leluhurnya, Begini Nasib Suku Amungme di Papua”, < <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/21/tersingkir-perlahan-daritanah-leluhurnya-begini-nasib-suku-amungme-di-papua>>.

Richard Kalilaga, badanbahasa.kemdikbud.go.id, Persebaran Bahasa Daerah di Papua dan Analisis Pergeserannya (Kasus Bahasa Daerah Tepra dan Sentani di Jayapura), <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/2722/persebaran-bahasa-daerah-di-papua-dan-analisis-pergeserannya-kasus-bahasa-daerah-tepra-dan-sentani-di-jayapura>.

Siti Rakham Mary Herwati, “Kriminalisasi Masyarakat Hukum Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan,” <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan>.

Suara Papua, Suara Papua.com, Mengungkap January Agreement 1974 antara PTFI dan Suku Amungme (Bagian II), <https://suarapapua.com/2024/01/31/mengungkap-january-agreement-1974-antara-pt-fi-dan-suku-amungme-bagian-ii/>. diakses pada 9 July 2024.

Syahidah Izzata Sabila, Hukum Adat di Indonesia : Sejarah, Bukti hingga Perkembangannya, Detik.com, diakses via : <https://news.detik.com/berita/d-6005955/hukum-adat-di-indonesia-sejarah-bukti-hingga-perkembangannya>.

Transparency International. (2010). Corruption by Country/Territory: Papua New Guinea. Retrieved from http://www.transparency.org/country#PNG_PublicOpinion.

United Nation Development Program [UNDP]. (2011). Papua New Guinea: HDI values and rank changes in the 2011 Human Development Report. Retrieved from <http://hdrstats.undp.org/images/explanations/PNG.pdf>.

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. (2010). Regional literacy profile - East Asia and the Pacific Retrieved from http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=367&IF_Language=eng&BR_Region=40515.

Von Odo Marquard, Hegel Und Das Sollen, Philosophisches Jahrbuch, 72: 103, 1964. Via : <https://philpapers.org/rec/MARHUD-2>.

Widya L. Ningsih, dan Nibras N. Nailufar, Undang-Undang Agraria 1870 : Isi, Tujuan, Pengaturan dan Pelanggaran, diakses via : https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/16/090000379/undang-undang-agraria-1870-isi-tujuan-pengaruh-dan-pelanggaran#google_vignette

World Bank. (2011a). Papua New Guinea Economic Briefing: Enjoying the opportunities and facing the challenges of resurgent commodity prices. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/INTPAPUANEWGUINEA/Resources/PNG_Econ_Update_April_2011.pdf

World Bank, 2011b, World Development Indicators: GDP ranking Retrieved from <http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table>.

WRI, “Bagi Masyarakat Adat, Kehilangan Tanah Sama Saja Kehilangan Nyawa,” <https://wri-indonesia.org/id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan-nyawa>.

Yuda Prinada, Tirto.id, Apa itu Pengertian VOC, Sejarah Kapan Didirikan, dan Tujuannya?, <https://tirto.id/apa-itu-pengertian-voc-sejarah-kapan-didirikan-dan-tujuannya-gaaG>.

Diakses pada 5 Agustus 2024. Terbit 14 Februari 2021.

LAINNYA

Abdurrahman dan Sondra Wentzel, Konsep untuk menyelesaikan masalah status tanah Masyarakat di Kawasan hutan pada areal HPH dan HPHTI di Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Pengembangan Sistem Manajemen Hutan Lestari, 1997

Ahmad Khoirul Umam, “Reformasi Tata Kelola atukah Resentralisasi Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba di Indonesia”, dalam uasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, ed. Ahmad Khoirul Umam (Jakarta: Universitas Paramadina, 202.

Agustinus Wisnu Dewantara, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia, Seminar Nasional KeIndonesiaan IV Tahun 2019 “Multikulturalisme Dalam Bingkai Ke-Indonesiaan Kontemporer”

August Kafiari; Tom Beanal (2000). *PT. Freeport Indonesia Dan Masyarakat Adat Suku Amungme*. Forum Lorentz

Edi, Suharto, Paradigma Kesejahteraan sosial, di sampaikan pada Seminar Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 6-7 September 2007.

Erwiza Erman, “Aktor, Akses, dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka”, Masyarakat Indonesia, 36, 2, 2010.

Frans Reumi, Pluralisme Hukum dan Kebijakan Pertanahan di Papua, Prosiding, Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2019.

Hilda Hilmiah Diniyati, “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Hughes, H. (2003). *Aid has Failed in the Pacific* (Vol. 33): Centre for Independent Studies Sydney.

- Jogi Tjiptadi Soedarjono, “Kontrak Production Sharing sebagai landasan kegiatan Eksplorasi/Eksploitasi Minyak di lepas pantai”, Skripsi, FH UI, 1984.
- Kemp, D. L., Gillespie, K. and R. B. Ramsay. (2012). Case report 1: Papua New Guinea case study. In Keenan & Kemp, *Mining and local-level development: Examining the gender dimensions of agreements between companies and communities*. Brisbane, Australia: Centre for Social Responsibility in Mining, The University of Queensland.
- Kerjasama KOMNAS HAM, FH. Universitas Andalas Padang dan Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, Membangun Masa Depan Minangkabau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta : 2007.
- Lindra Darnela, Teori Keadilan John Rawls : Sebuah Review, diakses melalui halaman web : <https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review>. Pada 2 April 2024.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 200.
- Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Saafroedin Bahar, Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak Asasi manusia, Jakarta : 2005
- Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 200.
- Setiono, “Rule of Law”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Paulino Gatti, T. (2020). *Corporate Social Responsibility and Its role in attracting talents: A millennial perspective* (Doctoral dissertation, Dublin, National College of Ireland).
- Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004
- Soetaryo Sigit, “Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia”, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1996.
- PT Freeport Indonesia, Laporan Tahunan Community Affairs, 2013.
- Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara,

2010), hlm. 36, Dalam Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, hal 12.

